

KETAHANAN PANGAN ANTARA TANTANGAN, HARAPAN, DAN KENYATAAN

Agus Sri Wardoyo¹

¹Pusat Kajian Kependudukan SEJAHTERA, Sidoarjo

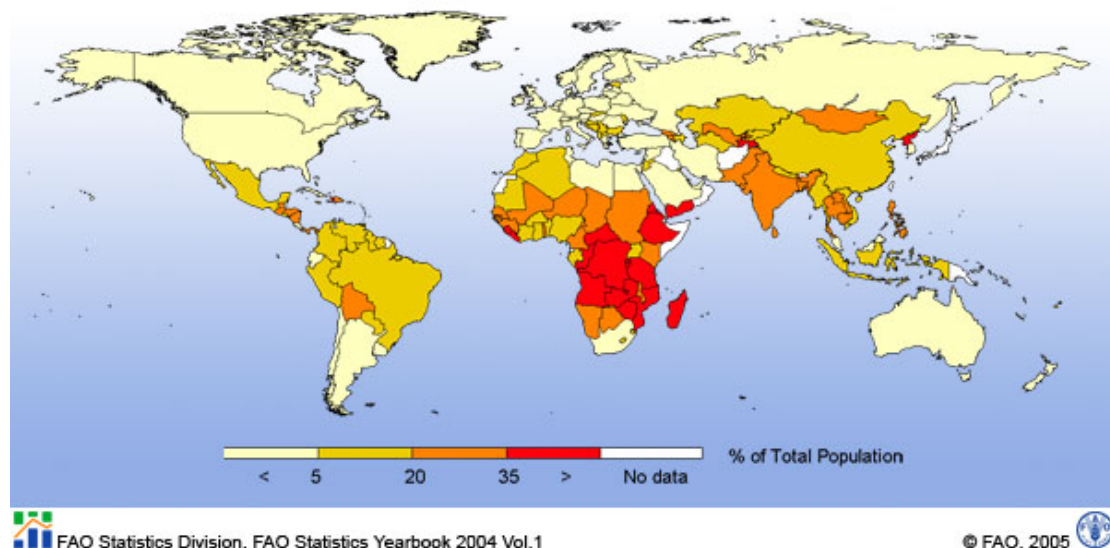
ABSTRAK

Memantapkan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi sumberdaya manusia. Ketahanan pangan sangat berkaitan dengan kemampuan daya beli. Padahal tingkat kemiskinan di Indonesia masih 16,7 persen (2004) atau 36,1 juta jiwa. Dalam makalah ini disajikan tren penduduk miskin di Indonesia sejak 1976-2004. Permasalahan dalam ketahanan pangan adalah perimbangan produksi dan kebutuhan pangan, ketergantungan pada impor pangan, tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial dan kriminalitas, alokasi dana yang tidak sesuai, dan KKN. Landasan pijak untuk memantapkan ketahanan pangan sebenarnya sudah ada berupa deklarasi hak azasi manusia, komitmen global/ pemerintah, Undang-undang, Kepmen, dan peraturan lainnya. Tiga aspek dalam pengembangan ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, pendapatan, dan pendidikan. Target populasi yang rawan pangan umumnya adalah keluarga miskin. Tahapan program perlu dibagi menjadi 4 tahap yaitu program pangan segera, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang mencakup tiga aspek pangan, pendapatan, dan pendidikan. Ahli gizi / dietisien dapat berperan dalam program ketahanan pangan, dari tingkat kebijakan sampai dengan implementasi.

Kata kunci:

PENDAHULUAN

Penduduk malnutrisi di Indonesia menurut peta FAO tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah antara 5 – 20 %. Dan ini bisa saja meningkat akibat naiknya harga BBM.



Tabel 1. JUMLAH PENDUDUK MISKIN 1976-2005
Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)

Tahun	Kota	Desa	Total
1976	10.00	44.20	54.20
1978	8.30	38.90	47.20
1980	9.50	32.80	42.30
1981	9.30	31.30	40.60
1984	9.30	25.70	35.00
1987	9.70	20.30	30.00
1990	9.40	17.80	27.20
1993	8.70	17.20	25.90
1996	9.60	24.90	34.50
1998	17.60	31.90	49.50
1999	15.60	32.30	47.90
2000	12.30	26.40	38.70
2001	8.60	29.30	37.90
2002	13.30	25.10	38.40
2003	12.30	25.10	37.40
2004	11.50	14.60	26.10
2005	-	-	45.28*

Sumber: Komite Penanggulangan Kemiskinan (1976-2004)

* 11,32 juta rumah tangga miskin x 4 orang. Sumber www.kompensasibbm.org

Dari tabel tersebut kita bisa melihat trend peningkatan jumlah penduduk miskin. Dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, otomatis gaya beli penduduk terhadap bahan pangan akan menurun. Dan ketahanan pangan akan semakin rawan. Adalah menjadi tantangan untuk kembali melihat konsep dan gerak ketahanan pangan kita.

Landasan gerak

1. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana dituangkan dalam *Universal Declaration of Human Right Tahun 1948*
2. *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan*. Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai usaha untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merataq serta terjangkau oleh setiap individu.
3. *Pada Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Sedunia Tahun 1996 di Roma*, para pemimpin negara dan pemerintahan telah mengikrarkan kemauan politik dan komitmennya untuk mencapai ketahanan pangan dan melanjutkan upaya penghapusan kelaparan di semua negara anggota, dengan *mengurangi separuh*

jumlah penderita kekurangan pangan dari 800 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi 400 juta jiwa pada tahun 2015.

4. Undang-undang no 25 tahun 2000 tentang Program Peningkatan Ketahanan Pangan
5. Kesepakatan bersama gubernur/ ketua dewan ketahanan pangan provinsi dalam konferensi dewan ketahanan pangan 2004 mengenai perwujudan ketahanan pangan wilayah dan nasional 9 Desember 2004 di Istana Negara
6. Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan No 05/Kpts/KP.150/1/2003 tentang pembentukan kelompok kerja system informasi ketahanan pangan (SIKAP)
7. Peraturan Pemerintah no 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Permasalahan

Masalah rentannya ketahanan pangan kita, tidak ansikh karena lemahnya penyediaan pangan, bahkan menurut data perimbangan produksi dan kebutuhan pangan (beras) tahun 2002 menunjukkan hanya ± 25 % propinsi yang mengalami deficit, yang lain imbang bahkan surplus.

Ada beberapa permasalahan lain :

- Peningkatan jumlah kemiskinan akibat kenaikan harga BBM (Oktober 2005) yang mengakibatkan menurunnya daya beli
- Pengangguran yang tinggi yang lebih dari 32 juta angkatan kerja
- Pertumbuhan ekonomi yang rendah yang hanya 2 – 3 %/tahun, yang setiap 1% pertumbuhan ekonomi menyediakan lapangan kerja baru ± 400.000 tenaga kerja, sementara pertumbuhan angkatan kerja baru di Indonesia 2,5 juta orang setiap tahunnya.
- Merajalelanya korupsi di berbagai tingkatan dan di berbagai daerah.
- Terjadinya konspirasi antara pelanggar hukum dan penguasa di berbagai tempat, seperti antara penyelenggara judi dengan aparat hukum, antara terpidana dengan aparat penegak hukum.
- Besarnya energi Pemerintahan dan masyarakat yang terkuras untuk masalah politik.
- Maraknya *money politic* dalam berbagai proses politik.
- Meluasnya kriminalitas dan terorisme serta konflik-konflik horizontal.
- Berkembangnya etno-centrisme, fanatisme dan radikalisme.
- Kebutuhan pangan bagi rakyat yang semakin tergantung dari import dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi.

Permasalahan yang cukup rumit ini sebenarnya bukan masalah baru, terutama bagi negara berkembang, dan banyak pula yang bisa mengatasinya dengan sukses. Yang

menjadi masalah adalah, sampai saat ini bukannya hal tersebut di atas makin menurun, tapi malah makin meningkat. Belum ada tanda-tanda penurunan atau perbaikan.

Alternatif solusi

Sudah cukup banyak kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengantisipasi rentannya ketahanan pangan di Indonesia. Namun semua sepakat bahwa kebijakan tersebut sering tidak diimbangi dengan implementasi di lapangan dan sinergisme dengan program kerja yang lain.

Pada dasarnya ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan ketahanan pangan, yaitu:

- a). Aspek ketersediaan pangan
- b). Aspek pendapatan
- c). Aspek pendidikan

Oleh karena itu harus ada kesepakatan antara pemerintah, praktisi, dan LSM untuk bersama-sama mengadakan kegiatan yang sinergis untuk alternatif solusi ketiga aspek di atas.

Program Pangan Keluarga Miskin

Faktor-faktor kunci keberhasilan pelaksanaan “Program Pangan untuk Keluarga Miskin”, yaitu:

1. Kesamaan *pengertian tentang kemiskinan* dan diterimanya istilah kemiskinan oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin.
2. Ketepatan *identifikasi daerah/wilayah dan kelompok masyarakat (rumah tangga) yang tergolong miskin* sebagai kelompok sasaran program.
3. Penyediaan *bantuan pangan yang tepat* (tepat sasaran, tepat bentuk dan tepat waktu) serta *kemantapan sistem dan mekanisme pengadaan dan distribusi bantuan*.
4. Penumbuhan *partisipasi masyarakat dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat* dalam rangka kesinambungan program secara mandiri dan tidak tergantung kepada Pemerintah.
5. Peningkatan kapasitas institusi pemerintah dan masyarakat.

Program Pangan Bersifat Segera

Bagi *keluarga miskin yang mengalami kerawanan pangan transien (mendadak)*, seperti untuk pengungsi, keluarga yang terkena bencana alam, kerusakan sosial dan politik, serta pemutusan hubungan kerja, program pangan yang perlu dilakukan segera antara lain adalah:

1. Pemberian *bantuan pangan cuma-cuma dan atau bersubsidi* dengan mengajak kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan mendadak tersebut.
2. Bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui, anak balita dan SD.
3. Penyediaan lapangan kerja untuk pangan bagi kelompok masyarakat yang terkena bencana sehingga dapat mengatasi masalah kerawanan pangan.

Program Pangan Jangka Pendek

Bagi *kelompok masyarakat yang mengalami kerawanan pangan kronis (rumah tangga miskin)*, program pangan yang perlu dilakukan antara lain adalah:

1. Pemberian *bantuan pangan bersubsidi dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan menyusui, anak balita dan anak SD*.
2. Peningkatan *pemanfaatan lahan pekarangan* untuk memenuhi penyediaan pangan dan obat-obatan di tingkat rumah tangga.
3. Pemberdayaan *cadangan pangan pedesaan*, seperti lumbung desa, hutan kemasyarakatan.
4. Peningkatan keterampilan teknis termasuk antisipasi anomali iklim dan manajemen usaha.
5. Peningkatan akses atas sumber daya usaha, modal, teknologi dan pasar.
6. Pengembangan prasarana ekonomi dasar di daerah miskin, jalan desa, listrik dan air bersih.
7. Peningkatan kapasitas instansi, jejaring kerja, komunikasi dan sistem informasi serta peningkatan nilai kepedulian sosial.
8. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
9. Peningkatan sosialisasi pentingnya diversifikasi pangan dan kesehatan masyarakat.

Program Pangan Jangka Menengah

Program pangan jangka menengah ditujukan untuk pemantapan dan pengembangan kegiatan yang bersifat segera dan jangka pendek serta kegiatan baru untuk mengatasi kerawanan pangan kronis dan sekaligus mendorong peningkatan usaha penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Program Pangan Jangka Panjang

Program pangan jangka panjang ditujukan untuk pemanfaatan dan pengembangan kegiatan yang bersifat segera, jangka pendek dan jangka menengah serta kegiatan yang baru untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan pangan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan selera.

Kemandirian Pangan

Perlu disadari oleh semua pihak akan adanya beberapa hal penting bahwa:

- a. Kemampuan kita di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, saat ini relative telah dan sedang menurun sangat besar.
- b. Keadaan rawan pangan kita saat ini bukan karena tidak adanya pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat Indonesia sudah tergantung dari supply luar negeri, dan ketergantungannya semakin besar
- c. Pasar pangan amat besar kita, diincar oleh produses pangan luar negeri.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus segera dilakukan agar kemandirian pangan kita meningkat. Antara lain sasaran tersebut adalah:

1. Perluasan areal pertanian,
2. Peningkatan skala usaha petani, peternak dan nelayan; untuk petani,
3. Menetapkan kebijakan yang dapat membuat harga produk pertanian di dalam negeri cukup baik, antara lain melalui tarif bea masuk, agar diperoleh rangsangan untuk peningkatan produksi. Arah kebijakan pertanian pada umumnya seharusnya mensejahterakan petani.
4. Menetapkan sasaran untuk dapat kembali berswasembasa beras di tahun 2006, daging sapi di tahun 2010 dan susu sapi tahun 2015.
5. Menetapkan sasaran untuk menjadi negara *nett exportir* pangan di tahun 2010, dengan idopsi teknologi.
6. Mengembangkan industri pertanian dan pangan yang berkualitas tinggi, Membangun agro industri di desa.
7. Mengembangkan diversifikasi pangan berbasis pangan local, penganeka ragam pangan (DPG: Diversifikasi Pangan dan Gizi)

KESIMPULAN

1. Peningkatan ketahanan pangan saat ini urgen untuk dilakukan
2. Program ini menuntut peran serta semua pihak, baik pemerintah, legislatif, LSM, masyarakat petani dan masyarakat umumnya.
3. Alternatif yang ditawarkan adalah dengan Program Pangan Keluarga Miskin dan Kemandirian Pangan

PENUTUP

Secara eksplisit ahli gizi / dietisien mempunyai peran yang besar dalam program peningkatan pangan, dalam hal kebijakan maupun implementasi di lapangan.